

## ABSTRAK

### IMPLIKASI PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KINERJA NOTARIS PEMEGANG SERTIFIKAT PASAR MODAL

Notaris yang melakukan kegiatan dibidang pasar modal harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan sertifikat pasar modal serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan, notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka notaris akan memiliki suatu sertifikat berupa Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang (STTD). Notaris pemegang sertifikat pasar modal sehubungan dengan akta-akta yang dibuatnya dikenakan suatu pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan jenis, satuan dan besaran yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi, membina dan mengatur kegiatan dibidang pasar modal.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa notaris pemegang sertifikat pasar modal dikenakan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan? (2) Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia Pusat terhadap pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada notaris pemegang sertifikat pasar modal?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan yang menyebabkan notaris pemegang sertifikat pasar modal dikenakan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tujuan selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia Pusat terhadap pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada notaris pemegang sertifikat pasar modal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal Research*, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan penarikan simpulan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang menyebabkan notaris pemegang sertifikat pasar modal dikenakan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena notaris pemegang sertifikat pasar modal termasuk sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan bukan sebagai pihak pendamping atau pihak penunjang dalam melakukan kegiatan disektor jasa keuangan, pihak pendamping atau pihak penunjang tidak melekat kepada suatu perusahaan tetapi melekat pada individu sebagai subyek hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia Pusat adalah melakukan *Judicial Riview* ke Mahkamah Agung, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan melakukan upaya hukum lainnya ketika gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi di tolak.

Saran dalam penelitian ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk dilakukan revisi dan uji materi mengenai pungutan yang dikenakan kepada notaris pemegang sertifikat pasar modal.

**Kata Kunci: Implikasi, Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Notaris, Pasar Modal**

## ABSTRACT

### THE IMPLICATION OF THE COLLECTION BY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ON THE PERFORMANCE OF THE NOTARY OF STOCK EXCHANGE CERTIFICATE HOLDER

The Notary who performs the activity in the field of stock exchange must initially join the training of stock exchange certificate and is listed in the Financial Service Authority with the requirements and procedures that have been determined. The Notary who has been listed in the Financial Service Authority has a certificate in the form of The Registration Letter of Supporting Profession (STTD). The Notary of stock exchange certificate holder is related to the deeds he makes because of a collection by the Financial Service Authority by the type, unit, and amount which have been determined by the Financial Service Authority as the institution who monitor, build, and manage the activities in the field of stock exchange.

The problems examined in this research were: (1) Why is the notary of stock exchange certificate holder charged the collection by the Financial Service Authority? (2) How are the legal action conducted by the Indonesian Notary Association in the Center to the collection performed by the Financial Service Authority against the notary of stock exchange certificate holder?

The aims of this research were to study and analyze the reasons that make the notary of stock exchange certificate holder get the collection by the Financial Service Authority, and to study and analyze the legal actions conducted by the Indonesian Notary Association in the Center to the collection performed by the Financial Service Authority to the notary of stock exchange certificate holder.

The research method used in this research was the approach of Socio-Legal Research. The research specification used analytical descriptive. The data collection technique used in this research was field study in the form of interview and library research. The data analysis technique used in this research was qualitative analysis with the conclusion drawn by using inductive method.

The research results show that the reason that cause the notary of stock exchange certificate holder charged the collection by the Financial Service Authority is because the notary of stock exchange certificate holder is included in the parties who perform the activities in the field of finance, not as the assisting or supporting parties in performing the activities in the field of financial services. The assisting and supporting parties are not attached in a company, but those are attached in individuals as the legal subjects. The legal actions performed by the Indonesian Notary Association in the Center were by doing Judicial Review to the Supreme Court, applying the lawsuit to the Constitutional Court, and performing other legal actions when the lawsuit applied to the Constitutional Court was rejected.

The recommendation in this research was in order that the regulation issued by the Financial Service Authority is expected to have a revision and a material examination on the collection charged to the notary of stock exchange certificate holder

**Keywords: Implication, Collectio Financial Service Authority, Notary, Stock Exchange**